

PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM JUMOG DI DESA WISATA BERJO, NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR

Chalysta Nurul Hidayah, Amni Zarkasyi Rahman

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405**

Laman: www.fisip.undip.ac.id

Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The development and management of Jumog Nature Tourism still experience problems such as suboptimal BUMDes governance, limited involvement of tourism actors in decision making. This study aims to examine the role of stakeholders in the development of Jumog Nature Tourism in Berjo Village, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, using five dimensions of stakeholder roles, namely policy creator, coordinator, facilitator, implementor, and accelerator. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation of the Berjo Village Government, BUMDes Alam Berjo, Disparpora Karanganyar Regency, BENTUR Community, Business Actors, and also the community involved in tourism management. The results of the study indicate that the role of stakeholders in the development of Jumog Nature Tourism has been carried out collaboratively, but not yet fully optimal, seen from the five dimensions, namely policy creators who still experience obstacles in the form of unclear results of the formulated policies, then coordinators who show that there is still miscommunication and also lack of community involvement in communication, the role of facilitator actors who are lacking in providing support to target groups such as, lack of structured training, the role of implementor actors who are still overlapping and also the role of accelerators who are still lacking in providing encouragement to tourist destinations. Overall, the role of stakeholders in the development of Jumog Nature Tourism has a positive impact on the village but is still not optimal, this can be seen from the obstacles still faced by each stakeholder.

Keywords: Role of stakeholders, stakeholders, tourism village, Jumog Nature Tourism, Berjo Village

ABSTRAK

Pengembangan dan pengelolaan Wisata Alam Jumog masih mengalami permasalahan seperti tata kelola BUMDes yang belum optimal, keterbatasan keterlibatan pelaku wisata dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Berjo, kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, menggunakan lima dimensi peran *stakeholders*, yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi terhadap Pemerintah Desa Berjo, BUMDes Alam Berjo, Disparpora Kabupaten Karanganyar, Komunitas BENTUR, Pelaku usaha, dan juga masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog telah dilakukan secara kolaboratif, namun belum sepenuhnya optimal, dilihat dari kelima dimensi yaitu *policy creator* yang masih mengalami kendala berupa kurang jelasnya hasil kebijakan yang dirumuskan, lalu koordinator yang menunjukkan bahwa masih adanya miskomunikasi dan juga kurang terlibatnya komunitas dalam komunikasi, peran aktor fasilitator yang kurang dalam memberikan dukungan kepada kelompok sasaran seperti, kurangnya pelatihan yang secara terstruktur, peran aktor implementor yang masih tumpang tindih dan juga peran akselerator yang masih kurang dalam memberikan dorongan terhadap destinasi wisata. Secara keseluruhan, Peran *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog memberikan dampak yang positif bagi desa namun masih belum optimal hal ini terlihat dari kendala yang masih dihadapi dari setiap *stakeholders*.

Kata Kunci : Peran *stakeholder*, *stakeholders*, Desa wisata, Wisata Alam Jumog, Desa Berjo

PENDAHULUAN

Industri Pariwisata memiliki peran dan fungsi penting pada mendorong pertumbuhan ekonomi negara tidak terkecuali Indonesia. Sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap kontribusi signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) selain dalam hal perekonomian negara sektor pariwisata dapat memberikan dan menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, pengembangan wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia pada tingkat global (Hendaru et al., 2024).

Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai sektor telah berkembang pesat di provinsi ini termasuk dalam sektor pariwisata. Sebagai salah satu sektor yang cukup kuat dan sebagai andalan pariwisata memainkan peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah baik melalui pengeluaran wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Jawa Tengah telah aktif melakukan

pengembangan diberbagai destinasi wisata yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi wisata yang beragam mulai dari wisata alam, budaya, sejarah hingga religi. Setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki daya tarik tersendiri yang mampu menarik wisatawan.

Salah satu kabupaten yang memiliki daya tarik tinggi dan mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal pariwisata di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Karanganyar. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 menyatakan bahwa Kabupaten Karanganyar merupakan kabupaten di kawasan strategis nasional subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Kabupaten Karanganyar ini dulunya lebih dikenal dengan sektor pertanian dan perkebunan, namun seiring dengan kemajuan zaman dan adanya daya dukung infrastruktur yang semakin memadai seperti akses jalan yang lebih baik, transportasi umum, dan juga fasilitas pendukung lainnya.

Kabupaten Karanganyar kini telah bertransformasi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah. Perubahan ini menandai pergeseran penting

dalam peran Kabupaten Karanganyar dalam ekonomi, dari daerah agraris menjadi wilayah dengan potensi pariwisata yang terus berkembang. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa Wisata yang mengatur peran berbagai *stakeholders* dalam pengembangan desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa Wisata bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pihak dalam membangun sektor pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Selain, pemerintah pengembangan desa wisata dilakukan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis), BUMDes, serta pelaku usaha wisata yang bertanggung jawab dalam penyediaan atraksi wisata, usaha pariwisata, serta sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan wisatawan (Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa Wisata).

Kabupaten Karanganyar menawarkan beragam destinasi wisata yang memiliki daya tarik unik bagi wisatawan. Keindahan alamnya, seperti Lereng Gunung Lawu, Air Terjun Grojogan Sewu, dan Perkebunan Teh Kemuning, menjadi daya tarik utama yang membedakan Karanganyar dari daerah lain (Karanganyarkab.go.id, 2024). Wisatawan

dapat menikmati pemandangan alam yang asri sambil merasakan suasana pedesaan yang masih kental. Selain itu, keberadaan situs-situs sejarah dan budaya seperti Candi Sukuh dan Candi Cetho yang berusia ratusan tahun juga menambah nilai sejarah yang membuat sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar semakin menarik. Kabupaten Karanganyar menjadi daerah peringkat ke 3 dengan kunjungan wisata terbanyak di Jawa Tengah.

Tabel 1. 1 Banyaknya Pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah



Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan grafik “Data Pengunjung Wisata dan Event di Kabupaten Karanganyar” tahun 2020–2024, terlihat bahwa jumlah wisatawan nusantara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung nusantara tercatat sekitar 900 ribu orang, kemudian menurun drastis pada 2021 menjadi sekitar 250 ribu orang. Tahun 2022 jumlahnya kembali naik hingga sekitar 1 juta orang, lalu kembali turun di

2023 menjadi sekitar 450 ribu orang. Peningkatan terbesar terjadi pada 2024, di mana jumlah pengunjung nusantara melonjak tajam hingga sekitar 2 juta orang. Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara relatif stabil dengan angka yang jauh lebih rendah dibanding wisatawan nusantara. Tahun periode 2020–2024, jumlahnya berkisar di bawah 20 ribu orang. Data ini menunjukkan bahwa wisatawan nusantara masih menjadi mayoritas pengunjung di Karanganyar, meskipun terdapat sedikit tren kenaikan kunjungan dari wisatawan mancanegara pada tahun terakhir. Berikut merupakan tabel desa wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar:

Tabel 1. 2 Desa Wisata Yang Ada Di Kabupaten Karanganyar

| NO | Desa Wisata | Kecamatan | Destinasi wisata |
|-----|---------------------------------|--------------|--|
| 1. | Kampung Wisata Barokah | Karangpandan | Wisata Edukasi (Pertanian, Peternakan, Memanah, Berkuda), Wisata Alam Pedesaan, Homestay |
| 2. | Desa Wisata Sumbeluh | Mojogedang | Sendang Air, Pohon Bulu, Kesenian Daerah, Camping Ground |
| 3. | Desa Wisata Umbul Udai-Udalan | Tawangmangu | Kolam Renang-Umbul Mata Air, Kesenian Daerah, Wisata Edukasi |
| 4. | Desa Wisata Pancot | Tawangmangu | Alam (Kedung Sriti, dll), Seni Reog, Tubing, Outbound |
| 5. | Desa Wisata Plenggan | Gondangrejo | Kolam Renang, Kesenian Daerah, Taman Edukasi, Wisata Budaya |
| 6. | Desa Wisata Girimulyo | Ngargoyoso | Air Terjun Parangjo, Kolam Renang, Flying Fox |
| 7. | Kampung Wisata Klatak | Karangpandan | Lukisan Mural, Kesenian Daerah, Wisata Edukasi, Jembatan Selfi |
| 8. | Desa Wisata Womorojo Elok | Jatiyoso | Wisata Edukasi, Kesenian Daerah, River Tubing, Air Terjun Buto Jco |
| 9. | Kampung Wisata Sewu Kembang | Tawangmangu | Situs Manggung, Jurang Sundo, Bumi Perkemahan, Museum Lumpang |
| 10. | Desa Wisata Berjo | Ngargoyoso | Telaga Madirda, Air Terjun Jumog, Candi Sukuh |
| 11. | Desa Wisata Batik Girilayu | Matesih | Batik Girilayu, Tubing Kali Mangadeg, Astana Mangadeg |
| 12. | Desa Wisata Sendang Bejen | Mojogedang | Sendang Bejen, Kolam Renang, Jembatan Selfi |
| 13. | Desa Wisata Kemuning | Ngargoyoso | Wisata Kebun Teh, Pasar Mbatok, River Tubing |
| 14. | Desa Wisata Anggramanis | Jenawi | Embung Banyu Kuvung, Kesenian Daerah, Tempat Selfi |
| 15. | Desa Wisata Kampung Purba Davu | Gondangrejo | Wisata Edukasi, Kesenian Daerah, Mata Air Sumur Emas, Museum Purba |
| 16. | Desa Wisata Lembah Dongede | Mojogedang | Pasar Bahulak Ciplukan, Kesenian Daerah, River Tubing |
| 17. | Desa Wisata Gempolan | Kerjo | Wisata Edukasi, Wahana Selfi, Kesenian Daerah |
| 18. | Desa Wisata Alauka | Kerjo | Wisata Edukasi, Kesenian Daerah, Tempat Selfi, Kolam Renang |
| 19. | Desa Wisata Taman Sari | Kerjo | - |
| 20. | Desa Wisata Pahlengan | Matesih | - |
| 21. | Kampung Wisata Sekipan | Tawangmangu | Wahana Selfi, Camping Ground, Wisata Petik Stroberi |
| 22. | Desa Wisata Cetho | Jenawi | Candi Cetho, Candi Kethak, Kesenian Daerah, Kirab Budaya |
| 23. | Kampung Wisata Elumbang | Tawangmangu | Pringgodani, Kirab Budaya Mondhoosiyu, Wisata Pertanian, Camping |
| 24. | Agro Wisata Kembang Desa Dawung | Matesih | Taman Bunga Dawung, Kolam Renang, Wisata Edukasi |

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Desa Wisata Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dalam perkembangannya, pengelolaan BUMDes Alam Berjo sempat menghadapi permasalahan tata kelola pada priode 2019-2024, yaitu kasus korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan tiket masuk objek wisata yang menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah serta menunjukkan adanya praktik pengelolaan dana yang kurang transparan (Metrotvnews, 2024). Kondisi tersebut mencerminkan adanya tantangan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes sebagai lembaga pengelola utama destinasi wisata dan juga sebagai lembaga ekonomi desa. Meskipun demikian, sektor pariwisata di Desa Berjo tetap menunjukkan potensi yang besar dengan kontribusi terhadap pendapatan desa dan perekonomian masyarakat. Situasi ini menunjukkan adanya dinamika pengelolaan pariwisata desa yang melibatkan berbagai *stakeholders*, seperti pemerintah desa, BUMDes, Komunitas BENTUR, masyarakat desa, dan juga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam melihat peran *stakeholders* dalam mendukung keberlanjutan pengembangan desa wisata. Keterlibatan masyarakat di Desa

Wisata Berjo dapat dilihat dari sektor usaha jasa wisata, yang mana usaha jasa wisata merupakan salah satu sarana prasarana pariwisata yang dijalankan oleh penduduk lokal (Arvia.A.S., 2015).

Desa Wisata Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dalam perkembangannya, pengelolaan BUMDes Alam Berjo sempat menghadapi permasalahan tata kelola pada periode 2019-2024, yaitu kasus korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan tiket masuk objek wisata yang menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah serta menunjukkan adanya praktik pengelolaan dana yang kurang transparan (Metrotvnews, 2024). Kondisi tersebut mencerminkan adanya tantangan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes sebagai lembaga pengelola utama destinasi wisata dan juga sebagai lembaga ekonomi desa.

Desa Berjo dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah tersebut. Salah satu daya tarik utama di Desa Wisata Berjo adalah Wisata Alam Jumog, yang terkenal dengan keindahan alam berupa air terjun Jumog. Air Terjun Jumog telah dibuka untuk umum sejak tahun 2004 oleh Bupati Kabupaten Karanganyar pada saat itu. Air Terjun Jumog menyajikan keasrian alami air terjun dengan tersedianya aneka fasilitas

pendukung wisata yang ada. Air Terjun Jumog ini merupakan kepemilikan dari BUMDes Desa Berjo.

Sejak resmi dikelola sebagai Desa Wisata pada tahun 2008, Desa Berjo dengan ikon unggulannya Air Terjun Jumog memiliki modal yang kuat untuk berkembang menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Karanganyar. Desa Berjo memiliki potensi alam yang menarik yang seharusnya dapat menjadi modal untuk mencapai status “Desa Wisata Maju” atau bahkan “Mandiri” sesuai dengan kriteria pengembangan desa wisata. Sejak diresmikan menjadi desa wisata, Desa Berjo telah memiliki rentan waktu lebih dari 15 tahun yang mana idealnya berbagai aspek pengelolaan telah matang.

BUMDes sebagai salah satu *stakeholder* kunci secara Wisata Alam Jumog merupakan wisata di bawah kepemilikannya. Berdasarkan hasil penelitian (Bayu et al. 2023) bahwa dalam pengembangan Wisata Alam Jumog peran *stakeholders* masih belum optimal, salah satunya ditandai dengan pengelolaan oleh BUMDes yang kurang transparan dan akuntabel, serta adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan pengurus BUMDes Desa Berjo. Peran BUMDes yang seharusnya mengelola pendapatan dan mengalokasikan dana untuk perbaikan fasilitas, serta

pemberdayaan masyarakat menjadi terganggu dan tidak terlaksana secara maksimal. Selain itu, desa ini telah dinyatakan menjadi desa wisata sejak tahun 2008, namun hingga saat ini status Desa Wisata Berjo masih tergolong dalam desa “berkembang” (Jadesta.com 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Berjo memiliki potensi yang cukup besar, terutama melalui keberadaan Wisata Alam Jumog yang menjadi destinasi wisata dengan jumlah kunjungan wisata tertinggi di desa tersebut serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa dan perekonomian masyarakat. Namun, berbagai dinamika yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes, termasuk permasalahan tata kelola yang pernah muncul, menunjukkan bahwa potensi wisata yang besar tersebut menghambat Desa Berjo dalam mencapai Indeks Desa Membangun (IDM) desa maju dan mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Wisata Alam Jumog tidak hanya berkaitan dengan potensi wisata yang dimiliki, tetapi juga dengan bagaimana peran berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pengembangannya.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran setiap *stakeholder* berkontribusi terhadap

pengembangan desa wisata yang telah beroperasi lebih dari satu dekade namun belum mencapai status desa wisata maju. Minimnya kajian yang membahas peran seluruh *stakeholder* secara menyeluruh membuat penelitian ini penting dilakukan, karena hasilnya dapat menjadi dasar perumusan strategi pengelolaan dan pengembangan yang lebih efektif. Selain itu, temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah desa, BUMDes, Komunitas, dan pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan perannya sehingga pengembangan Wisata Alam Jumog dapat lebih terarah dan berkelanjutan.

Maka dari pendahuluan di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peran dari masing-masing *stakeholder* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Berjo?
2. Apa aspek pendukung dan aspek penghambat dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Berjo?

Sehingga dari permasalahan di atas dapat ditarik tujuan penelitian;

1. Menganalisis bagaimana peran yang dijalankan setiap *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Berjo.
2. Menganalisis aspek yang menjadi pendukung dan aspek yang menjadi

penghambat dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Berjo.

KAJIAN TEORI

a. *Stakeholders*

Stakeholder mencakup semua pihak, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi, yang memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini mencakup pemegang saham, pemerintah, masyarakat sekitar, komunitas internasional, dan berbagai lembaga di luar perusahaan.

Maryono et al., 2015 dalam Nadhif.I.N 2024, identifikasi stakeholder :

1. *Stakeholder* Primer

Stakeholder primer merujuk pada pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu kebijakan atau program, maupun kegiatan.

2. *Stakeholder* Kunci

Stakeholder utama merujuk pada pihak yang memiliki tanggung jawab hukum sekaligus kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait implementasi sebuah kebijakan.

3. *Stakeholder* Sekunder

Pihak pendukung atau *stakeholder* sekunder adalah kelompok yang tidak berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan suatu rencana atau tuisi, atau kegiatan tertentu, serta tidak mempunyai kepentingan utama terhadap kebijakan tersebut.

b. Peran *Stakeholders*

Peran *stakeholder* dapat dianalisis berdasarkan tingkat pengaruh (*power*) dan juga tingkat kepentingannya (*interest*) yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* (Thompson dalam Sandy., 2020) yang dikutip dalam Alifisyiam,F.N.2024).

Nugroho, et al., (2014), menyatakan *stakeholder* dalam program pengembangan, *stakeholder* dapat dikelompokkan berdasarkan perannya;

1. *Policy Creator*, yaitu *stakeholders* mempunyai peranan menjadi penentu kebijakan dan juga pengambil keputusan.
2. Koordinator, *stakeholder* yang mempunyai peran untuk mengelola koordinasi *stakeholders* lainnya tersebut yang berperan atau terlibat dalam suatu program pembangunan.
3. Fasilitator, *Stakeholders* yang mempunyai peran untuk memfasilitasi kebutuhan kelompok sasaran.

4. Implementor, *stakeholders* yang melaksanakan kebijakan terdiri atas kelompok yang menjadi sasaran.
5. Akselerator, *stakeholders* yang mempunyai peran untuk percepatan dan kontribusi bafi program agar dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang di tentukan.

c. Pengembangan Pariwisata

Hadiwijoyo (dalam Zwenli., 2019) menyatakan bahwa desa wisata merupakan wilayah pedesaan yang menggambarkan keaslian desa melalui berbagai aspek, seperti kehidupan ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, dan aktivitas sehari-hari masyarakatnya. Desa wisata juga memiliki tata ruang yang menarik dan khas, sehingga menjadi daya tarik yang unik bagi pengembangan sebuah wisata berbasis lokal.

METODE PENELITIAN

Peneliti mengadopsi Studi ini mengusung pendekatan deskriptif kualitatif, yang Bertujuan untuk menguraikan fenomena atau ciri-ciri individu, kondisiatau kelompok tertentu dengan tepat. Metode ini bertujuan menghasilkan suatu deskripsi atau narasi tentang sebuah fenomena, tidak bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel atau menguji hipotesis. Penelitian

ini dilakukan di Desa Wisata Berjo, yang berada di wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan fokus pada kawasan Wisata Alam Jumog. Subjek dalam penelitian ini adalah individu dan kelompok memiliki keterlibatan langsung atau pengetahuan mendalam tentang pengembangan pariwisata di Desa Wisata Berjo, khususnya di kawasan Wisata Alam Jumog seperti, BUMDes Alam Berjo, Perangkat Desa Berjo, Komunitas, Pelaku usaha, dan juga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, serta masyarakat tourism. Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan dua sumber yaitu, sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan (observasi), wawancara, dan juga dokumentasi. Miles dan Huberman (1994) menggambarkan analisis data kualitatif dengan tahapan mengumpulkan data, menampilkan data, mendapatkan data dan menarik dan verifikasi kesimpulan. Jenis triangulasi yang dipakai adalah tiangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *Stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Wisata Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar

1. Peran *Policy Creator* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Wisata Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar

Peran *policy creator* dalam pengembangan dan pengelolaan Wisata Alam Jumog dijalankan secara langsung oleh BUMDes Alam Berjo sebagai lembaga pengelola utama destinasi wisata di Desa Berjo. BUMDes Alam Berjo memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan operasional yang menjadi dasar penyelenggaraan aktivitas pariwisata, seperti penyusunan Peraturan Kepala Desa Berjo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Anggaran Rumah Tangga BUMDes Alam Berjo, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan usaha, SOP pegawai, dan juga tata tertib bagi pengunjung wisata.

BUMDes Alam Berjo dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Wisata Alam Berjo tidak bertindak secara bebas, melainkan berlandaskan pada regulasi desa yang berlaku, khususnya berlandaskan pada Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Alam Berjo. Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh BUMDes akan di bawa ke dalam forum MusDes sebagai

mekanisme pengambilan keputusan yang dihadiri oleh BUMDes, Pemdes Berjo, BPD, serta unsur masyarakat yang terkait. Melalui MusDes inilah kebijakan yang dirumuskan oleh BUMDes memperoleh legitimasi formal sehingga dapat diberlakukan secara sah dan menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan Wisata Alam Jumog.

Secara keseluruhan, peran *policy creator* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog telah dijalankan sesuai dengan teori yang digunakan. BUMDes Alam Berjo berperan sebagai aktor utama dalam penentuan dan pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan wisata baik dalam penetapan aturan operasional, pembagian hasil, maupun arahan pengembangan wisata yang sesuai dengan pandangan Nugroho (2014) bahwa *policy creator* merupakan *stakeholders* yang memiliki kewenangan sebagai penentu kebijakan sekaligus pengambilan keputusan.

Peran tersebut juga sejalan dengan *collaborative governance* menurut Ansell & Gash (dalam Nurcahyanti, 2025) karena kebijakan yang dirumuskan tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan mekanisme Musyawarah Desa yang dapat melibatkan berbagai *stakeholder* sehingga aktor yang berkaitan dapat terakomodasi. Selain itu, keterlibatan *stakeholder* dalam proses perumusan kebijakan

mencerminkan upaya BUMDes untuk menjaga legitimasi sosial. Namun peran *policy creator* harus lebih di optimalkan karena hasil kebijakan yang dihasilkan oleh aktor *policy creator* masih belum jelas dan tidak transparan karena tidak terbukanya pengelola. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat tidak jelas dan tidak adanya dokumen pendukung secara fisik dan juga kebijakan yang dibuat masih secara umum, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP).

2. Peran koordinator dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Wisata Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar

Hubungan koordinasi *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog menunjukkan pola koordinasi yang bersifat satu arah dan berjenjang antara Komunitas BENTUR (komunitas Berjo Jeep Adventur yang di bentuk oleh masyarakat Berjo), BUMDes Alam Berjo, dan juga Pemerintah Desa Berjo. Komunitas BENTUR berada pada level paling bawah sebagai aktor pelaksana lapangan yang melakukan koordinasi internal di dalam kelompoknya serta menyampaikan aspirasi, masukan, dan keluhan kepada BUMDes Alam Berjo.

Koordinasi ini berlangsung melalui mekanisme briefing rutin dan evaluasi berkala yang di pimpin oleh BUMDes

sebagai pengelola utama sehingga komunikasi komunitas tidak langsung menuju pemdes melainkan melalui pengelola wisata. BUMDes Alam Berjo menempati posisi sentral sebagai aktor koordinator operasional.

BUMDes berperan menghimpun informasi dari komunitas dan pelaku usaha, menyelaraskan kepentingan di tingkat lapangan, serta memastikan seluruh aktivitas wisata berjalan sesuai dengan kebijakan dan tujuan pengelolaan Wisata Alam Jumog. BUMDes juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban, kebutuhan pengelolaan, serta hasil evaluasi operasional kepada Pemerintah Desa Berjo secara berkala. Pola ini menunjukkan bahwa BUMDes menjadi penghubung utama antara pelaku usaha, komunitas dengan pemegang kewenangan kebijakan di tingkat desa. Pemerintah Desa Berjo berada pada level yang paling atas dalam bagan koordinasi sebagai pemilik kewenangan kebijakan, bukan sebagai koordinator operasional.

Peran pemdes ini difokuskan pada penerimaan laporan, pengambilan keputusan strategis, serta penyesuaian kebijakan desa dengan kebutuhan pengelolaan wisata. Secara keseluruhan, Peran BUMDes Alam Berjo dan Pemerintah Desa Berjo sebagai koordinator

dalam pengelolaan Wisata Alam Jumog telah sejalan dengan konsep koordinasi sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2014) bahwa BUMDes Alam Berjo mengkoordinasikan kebijakan atau peraturan seperti, Standar Oprasional Prosedur (SOP) kepada para pelaku wisata dan mengkoordinasikan informasi terhadap *stakeholders* lainnya agar mencapai tujuan yang sama. Selain itu juga, Pemerintah Desa Berjo juga telah mengkoordinasikan informasi terhadap *stakeholders* eksternal seperti Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar hal ini telah sejalan dengan Nugroho (2014) yang menyatakan bahwa aktor koordinator harus mampu menampung serta menyelaraskan kebutuhan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Wisata Alam Berjo.

Peran koordinator juga telah sejalan dengan Crowston yang mana koordinasi berjalan agar kerja sama antara *stakeholder* tetap berjalan dan terarah (Eni Febrianti, 2023). Namun, kondisi lapangan lainnya menunjukkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh BUMDes masih belum sepenuhnya sejalan dengan Stoner dan Wankel karena komunikasi yang terjalin masih satu arah dan masih minimnya timbal balik yang dapat dilakukan.

3. Peran fasilitator dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Wisata Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar

Peran fasilitator dalam pengembangan Wisata Alam Jumog dijalankan oleh BUMDes Alam Berjo, Pemerintah Desa Berjo dan juga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. BUMDes Alam Berjo berperan sebagai fasilitator pada tingkat operasional dengan memberikan pendampingan langsung kepada pelaku wisata seperti pelaku usaha, pengelola lapangan, dan juga pelaku usaha, mengkoordinasikan aktivitas usaha, serta memberikan arahan teknis sesuai dengan aturan yang dibuat mengenai pengelolaan dan pelayanan. Kedekatan BUMDes dengan aktivitas harian wisata menjadikan aktor yang mampu menjembatani kebijakan desan dengan praktik lapangan meskipun bentuk fasilitasi yang dilakukan masih didominasi oleh pendampingan informal dan belum sepenuhnya terstruktur dalam program pelatihan yang berkelanjutan.

Sementara, Pemdes Berjo menjalankan peran fasilitator melalui penyediaan forum musyawarah desa sebagai ruang koordinasi dan pengambilan keputusan bersama antara *stakeholders*

serta memfasilitasi alur komunikasi BUMDes, masyarakat dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Disparpora Kabupaten Karanganyar berperan sebagai fasilitator pada tingkat kabupaten melalui pemberian pelatihan peningkatan SDM pengelola wisata. Meskipun peran fasilitator dari ketiga aktor tersebut telah berjalan dan saling melengkapi, temuan lapangan menunjukkan bahwa masih adanya keterbatasan anggaran dan belum meratanya pelatihan karena antusias kelompok sasaran yang masih minim menjadi kendala dalam pengembangan wisata ini.

Secara keseluruhan, Peran fasilitator dalam pengelolaan Wisata Alam Jumog sejalan dengan Nugroho (2014) yang menyatakan bahwa fasilitator berperan memfasilitasi dan mencukupi kebutuhan kelompok sasaran, baik dalam dukungan material maupun non-material, hal ini dapat dilihat dari peran BUMDes yang menyediakan ruang partisipasi, pendampingan terhadap komunitas dan juga pelaku usaha. Sementara itu, peran fasilitator menurut (Nugraha, 2021) menyatakan bahwa pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dengan menciptakan kondisi yang kondusif dengan pemberian pelatihan, pendampingan, dan peningkatan keterampilan. Namun, peran yang dijalankan

Pemerintah saat ini masih terbatas sehingga peran fasilitator menurut (Nugraha, 2021) tidak sepenuhnya sejalan karena hingga saat ini hanya terdapat pemberian fasilitasi forum MusDes dari pemerintah desa dan pemberian pelatihan yang diberikan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga, keterbatasan pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan karena masih terbatasnya anggaran dan juga rendahnya partisipasi sasaran terhadap adanya pelatihan.

4. Peran implementor dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Wisata Berjo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar

BUMDes Alam Berjo merupakan aktor Implementer utama dalam pengembangan Wisata Alam Jumog. Peran ini tercermin dari keterlibatan BUMDes Alam Berjo dalam menjalankan pengelolaan operasional harian mulai dari perawatan fasilitas wisata, penyelenggara atraksi wisata, pengelolaan layanan pengunjung, hingga pelaksanaan berbagai program wisata yang telah ditetapkan melalui kebijakan yang ada. BUMDes Alam Berjo bertanggungjawab secara langsung memastikan bahwa seluruh kebijakan dan perencanaan pengelolaan wisata dapat diimplementasikan secara

nyata di lapangan sehingga aktivitas wisata berjalan tertib, nyaman, dan berkelanjutan. Selain BUMDes Alam Berjo, Komunitas BENTUR dan pelaku usaha juga berperan sebagai Implementer pendukung dalam pengembangan Wisata Alam Jumog.

Komunitas terlibat secara langsung dalam pelaksanaan aktivitas wisata, pemeliharaan kebersihan, dan penyediaan atraksi dan pengalaman wisata sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Sementara pelaku usaha, berkontribusi melalui penyediaan layanan, penjagaan kenyamanan pengunjung, dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan wisata. Keterlibatan ketiga aktor ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata di Desa Berjo tidak hanya dijalankan oleh satu pihak, tetapi merupakan hasil kerja sama yang saling melengkapi dalam mewujudkan pengelolaan wisata Alam ^Jumog yang efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, peran Implementer telah sejalan dengan teori Nugroho (2014) yang menyatakan bahwa aktor implementer merupakan aktor yang melaksanakan kebijakan, sama dengan halnya bahwa BUMDes dan pelaku usaha serta Komunitas BENTUR merupakan aktor yang melaksanakan kebijakan wisata seperti Standar Operasional Prosedur (SOP)

pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan usaha, dan juga tata tertib lainnya. Selain itu, peran implementer juga sejalan (Hermawan, 2015) yang menekankan bahwa setiap Implementer harus memahami kebijakan yang dijalankan. Pemahaman tersebut dalam keberjalanannya disalurkan melalui evaluasi rutin, pengarahan, dan briefing yang dilakukan oleh pengelola kepada pelaku usaha dan komunitas, meskipun belum seluruhnya didukung oleh dokumen kebijakan tertulis yang lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara substansial peran implementer telah berjalan sesuai dengan (Nugroho, 2014) namun masih bersifat dan berbasis pengalaman lapangan, sehingga ke depan diperlukan penguatan pada aspek dokumentasi kebijakan agar pemahaman implementer tidak hanya bersumber dari komunikasi lisan, tetapi juga dari aturan yang tertulis dan terstruktur.

5. Peran akselerator dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Wisata Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar

Peran akselerator dalam pengembangan Wisata Alam Jumog dijalankan oleh aktor eksternal yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Karanganyar. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar berperan dalam mempercepat pengembangan wisata melalui promosi tingkat kabupaten, penyediaan forum koordinasi, serta pemberian pelatihan sumber daya manusia bagi pengelola wisata.

Peran akselerator Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar terlihat dari upaya melalui mendorong dengan program promosi melalui baliho sebagai destinasi wisata unggulan, menyediakan forum komunikasi lintas aktor, serta penyediaan pelatihan SDM yang ditujukan bagi pengelola wisata untuk mempercepat inovasi yang ditumbuhkan oleh masyarakat lokal agar sesuai dengan kebutuhan wisata. Bentuk dukungan tersebut berfungsi sebagai pemicu agar pengembangan Wisata Alam Jumog dapat berjalan lebih cepat dibandingkan jika hanya mengandalkan kapasitas desa dan BUMDes. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar berperan sebagai pihak yang mendorong dari luar agar proses pengembangan wisata tidak stagnan dan mampu mengikuti arah kebijakan pariwisata ditingkat kabupaten.

Secara keseluruhan, peran akselerator telah sejalan dengan teori

Nugroho (2014) yang menyatakan bahwa aktor akselerator memberikan dorongan untuk mempercepat suatu program, hal ini dapat dilihat dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang memberikan dorongan berupa program promosi dengan julukan destinasi wisata nomor 1 di Kabupaten Karanganyar dengan tujuan memperbanyak minat pengunjung agar Wisata Alam Jumog tetap menjadi wisata unggulan Kabupaten Karanganyar dan juga memberikan pelatihan bagi pengelola lapangan dan juga masyarakat yang terlibat dalam pengembangan wisata untuk mempercepat inovasi yang ditumbuhkan dari para pelaku wisata itu sendiri agar inovasi sesuai dengan kebutuhan.

Aspek-Aspek yang mempengaruhi pengembangan wisata alam Jumog di Desa Wisata Berjo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar

Pengembangan wisata alam Jumog di Desa Wisata Berjo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar dipengaruhi oleh beberapa aspek. Aspek-aspek yang mempengaruhi pengembangan wisata ini antara lain; 1) Partisipasi masyarakat, 2) Dukungan dari Pemerintah Desa, 3) Komunikasi lintas lembaga, 4) Pemberian pelatihan terhadap Komunitas dan pelaku wisata lainnya.

a. Aspek pendukung yang mempengaruhi pengembangan wisata alam Jumog di Desa Wisata Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek kunci dalam mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata, khususnya pada konteks desa wisata. Menurut hasil penelitian Darmayanti dkk, (2021) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan desa wisata dapat diukur melalui penerapan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*), dimana masyarakat lokal berperan aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil pariwisata.

Pendekatan ini mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal, sumber daya alam dan budaya serta wisatawan secara berkesinambungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Berjo tingkat partisipasi masyarakat tinggi, yang mana hal ini merupakan adanya dorongan kebijakan pengelolaan pariwisata yang mengatur bahwa hanya masyarakat Desa Berjo yang diperbolehkan untuk terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan wisata. Kebijakan ini memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk ikut berperan sebagai pelaku utama dalam

sektor pariwisata, baik pengelola, penyedia jasa, maupun pelaku usaha pendukung. Hal ini sejalan dengan teori *community-based tourism* (dalam Darmayanti et al., 2021) yang mana menekankan pada pemberdayaan lokal sehingga pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisata tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Dukungan dari pemerintah desa merupakan aspek pendorong penting dalam pengembangan pariwisata di Desa Berjo. Pemerintah Desa Berjo memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bentuk fasilitasi. (Arifiana Rahmandari et al., 2024) menyatakan bahwa salah satu peran pemerintah desa dalam memberi dukungan bagi warga yang ingin terlibat dalam struktur serta aktivitas komunitas. Dukungan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup penyediaan sarana komunikasi, informasi, dan wadah koordinasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan desa termasuk dalam sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Berjo telah menjalankan peran tersebut dengan memfasilitasi forum-forum diskusi yang melibatkan pengelola wisata,

BUMDes, dan masyarakat. Forum ini menjadi media penting untuk menyampaikan aspirasi, menyamakan persepsi, serta membahas permasalahan dan pengembangan destinasi wisata secara bersama-sama. Selain itu, pemdes juga memberi dukungan dalam bentuk penyediaan informasi pariwisata melalui website desa yang secara khusus memuat informasi terkait destinasi wisata di Desa Berjo.

Dukungan pemerintah desa ini sejalan dengan (Arifiana Rahmandari et al., 2024) yang menekankan konsep pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, aspek pendorong dalam pengembangan Wisata Alam Jumog didukung dengan tingginya partisipasi masyarakat serta adanya dukungan dari pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan warga lokal. Partisipasi masyarakat yang tinggi tercermin dari keterlibatan warga Desa Berjo dalam berbagai aspek pengelolaan wisata. Kondisi ini sejalan dengan (Darmayanti et al., 2021) yang menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan desa wisata sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat lokal secara berkelanjutan. Selain itu dukungan pemerintah desa juga merupakan sebuah pendukung dalam pengembangan wisata hal ini sejalan dengan dengan pernyataan

yang dikemukakan oleh (Arifiana Rahmandari et al., 2024)

b. Aspek penghambat yang mempengaruhi pengembangan wisata alam Jumog di Desa Wisata Berjo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar

Salah satu aspek penghambat dalam pengembangan Wisata Alam Jumog adalah masih kurang optimal komunikasi antara lintas lembaga antara *stakeholders* yang terlibat. Kondisi ini terlihat dari belum terlibatnya seluruh pihak dalam forum komunikasi yang terstruktur, terbatasnya koordinasi dengan pelaku wisata di tingkat lapangan, serta masih ditemukannya perbedaan pernyataan antara pengelola utama, yaitu BUMDes sebagai kelompok sasaran dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa aliran informasi antara aktor belum sepenuhnya terintegrasi dan berjalan dua arah, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan program pengembangan wisata. Hasibuan (dalam Fedrico dkk, 2020) menyatakan koordinasi merupakan kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan unsur-unsur manajemen serta pekerjaan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi lapangan

menunjukkan bahwa praktik komunikasi antara *stakeholders* belum sepenuhnya sejalan dengan Hasibuan (dalam Fedrico dkk, 2020).

Selain perbedaan pernyataan antara lembaga, aspek penghambat juga terlihat dari keterbatasan bentuk dukungan pengembangan kapasitas yang diterima oleh komunitas BENTUR dan pelaku wisata lainnya di tingkat lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dukungan dari dinas terkait terhadap komunitas masih terbatas dan hanya dalam bentuk pendampingan informal dan belum diikuti oleh program pelatihan yang berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berjalan secara lambat dan tidak merata, khususnya bagi komunitas yang terlibat langsung dalam operasional wisata. Keterbatasan pelatihan ini juga memperkuat indikasi lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas lembaga. Jika dikaitkan dengan Hasibuan (dalam Fedrico dkk, 2020) koordinasi menuntut adanya proses pengarahan, pengintegrasian, dan penyelarasan antar unsur organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Temuan lapangan menunjukkan bahwa belum sepenuhnya sejalan dengan Hasibuan (dalam Fedrico dkk, 2020) karena kegiatan pelatihan yang belum dikomunikasikan keseluruh aktor, hanya aktor tertentu yang mendapatkan pelatihan.

Secara keseluruhan, aspek penghambat pengembangan Wisata Alam Jumog terutama bersumber dari belum optimalnya komunikasi lintas lembaga serta keterbatasan dukungan penguatan kapasitas melalui pelatihan bagi komunitas dan pelaku wisata lapangan. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar aktor, baik antara pemerintah desa, BUMDes, pengelola wisata, amupun pemerintah daerah, menyebabkan masih adanya perbedaan pemahaman dan pernyataan terkait dengan peran, program, serta bentuk dukungan yang telah diberikan. Kondisi ini sejalan dengan Wibowo (dalam Mellu dkk, 2018) yang menyatakan bahwa aspek penghambat merupakan hal atau kondisi yang dapat menghambat atau menggagalakan suatu kegiatan, karena komunikasi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan miskomunikasi dalam pelaksanaan program. Selain itu keterbatasan pelatihan yang masih terbatas dan belum merata menunjukkan belum optimalnya fungsi koordinasi sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (dalam Fedrico dkk, 2020), bahwa koordinasi merupakan upaya mengerahkan dan mengintegrasikan seluruh unsur organisasi untuk mencapai tujuan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peran *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Wisata Berjo belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya peran *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog dilihat dari lima dimensi *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan juga akselerator. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, masih sering terjadinya miskomunikasi antara *stakeholders* yang terlibat seperti perbedaan pendapat dan juga informasi yang diberikan. Selain itu juga masih ditemukannya keterbatasan kelompok tertentu seperti komunitas dan juga pelaku usaha dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BUMDes maupun Pemdes, dan juga masih ditemukannya program yang tidak tersampaikan pada kelompok sasaran. Peran *stakeholders* sebagai *policy creator* belum optimal karena hasil kebijakan masih kurang jelas dan kurangnya transparansi terhadap *stakeholders* eksternal.

Peran *stakeholders* sebagai koordinator belum optimal hal ini karena pola koordinasi yang masih satu arah dan juga masih adanya aktor lapangan, yaitu Komunitas BENTUR yang tidak terlibat dalam koodinasi secara intensif. Selin itu juga, komunikasi yang ada antara lembaga masih kurang dengan adanya

miskomunikasi antara *stakeholders* yang terkait. Peran *stakeholder* sebagai implementor telah berjalan dengan BUMDes dan Komunitas BENTUR, serta pelaku usaha melaksanakan kebijakan wisata yang telah ditetapkan. Namun, peran ini belum optimal karena Komunitas BENTUR yang masih terbatas koordinasi sehingga masih kurang berpartisipasi secara struktur. Peran *stakeholder* sebagai peran akselerator telah berjalan dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Selain itu, peran akselerator belum optimal karena Disparpora Kab. Karanganyar hanya memberikan percepatan dengan dorongan promosi dan juga pemberian pelatihan terhadap pengelola utama, yaitu BUMDes Alam Berjo dalam waktu berkala dan tertentu saja

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan hasil penitilian mengenai peran *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Berjo, maka disusun beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan parwisata desa ke depannya;

- 1) Agar peran *stakeholders* dalam *policy creator* dapat berjalan lebih optimal

maka penulis memberikan rekomendasi dan saran bahwa Pemerintah Desa Berjo bersama BUMDes Alam Berjo disarankan untuk memperkuat substansi kebijakan pengelolaan wisata dengan penyusunan aturan yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh aktor lapangan lainnya serta memiliki legalitas formal, seperti adanya pembuatan kebijakan atau keputusan yang mengatur destinasi wisata yang ditetapkan secara resmi, misalnya pembuatan Peraturan Desa atau keputusan resmi dengan disertai nomor penetapan, sehingga dapat menjadi pedoman yang sah bagi seluruh *stakeholders* dalam pelaksanaan pengelolaan wisata.

- 2) Agar peran *stakeholders* dalam koordinator dapat berjalan lebih optimal maka penulis memberikan rekomendasi dan saran bahwa BUMDes Alam Berjo sebagai koordinator disarankan untuk mengembangkan pola koordinasi yang tidak hanya bersifat vertikal dan berjenjang, tetapi juga mendorong komunikasi horizontal antara *stakeholders*. Komunikasi horizontal di sini dimaksudkan bahwa koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam pengembangan Wisata Alam Jumog termasuk Pemdес, BUMDes, Disparpora, komunitas BENTUR,

serta pelaku usaha. Selain itu, peningkatan forum koordinasi lintas aktor, baik formal maupun informal, perlu dilakukan agar informasi kebutuhan lapangan, serta permasalahan yang muncul dapat segera direspon secara bersama tanpa mengurangi perbedaan persepsi di antara lembaga.

- 3) Agar peran *stakeholders* dalam fasilitator dapat berjalan lebih optimal maka penulis memberikan rekomendasi dan saran bahwa para aktor fasilitator seperti BUMDes Alam Berjo, Pemerintah Desa Berjo, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan peran fasilitator dengan konsistensi dalam pemberian program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang lebih terstruktur dan juga lebih merata terhadap para pelaku wisata, dan juga berkelanjutan. Pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pelaku wisata misalnya, pelatihan promosi digital bagi pengelola wisata, pelatihan peningkatan sumber daya manusia agar dapat lebih berinovasi dalam pengembangan wisata Jumog, dan juga pelatihan bagi komunitas sebagai pelaksana wisata agar berinovasi untuk kegiatan dan atraksi wisata.

4) Agar peran *stakeholders* dalam Implementor dapat berjalan lebih optimal maka penulis memberikan rekomendasi dan saran bahwa BUMDes Alam Berjo, pelaku usaha, dan Komunitas BENTUR sebagai Implementor diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan pengelolaan wisata melalui penguatan pemahaman terhadap standar dan tujuan kebijakan serta memperkuat komunikasi. Hal ini dapat diwujudkan misalnya dengan, adanya komunikasi rutin mengenai kebutuhan yang diperlukan agar tidak terjadinya miskomunikasi, melaksanakan aktivitas wisata sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan juga mengesampingkan permasalahan pribadi yang menyebabkan perpecahan komunikasi.

5) Agar peran *stakeholders* dalam akselerator dapat berjalan lebih optimal maka penulis memberikan rekomendasi dan saran bahwa Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai akselerator disarankan untuk memperluas bentuk percepatan dengan dorongan tidak hanya pada promosi wisata dan pelatihan SDM. Percepatan dorongan tambahan yang diberikan oleh Disparpora Kabupaten Karanganyar dapat berupa dorongan pemberian target pengunjung bagi desa

wisata agar desa tersebut dapat meningkatkan promosi dan juga inovasi untuk menarik pengunjung. Selain itu juga, Disparpora Kabupaten Karanganyar dapat mempercepat perkembangan Wisata Alam Jumog dengan mendorong perkembangan fasilitas pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- AAbdul Kadir. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia* Penerbit Cv. Dharma Persada Dharmasraya 2020.
- FFafurida, F., Purwaningsih, Y., Mulyanto, M., & Suryanto, S. (2023). Tourism Village Development: Measuring The Effectiveness Of The Success Of Village Development. *Economies*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/Economies11050133>
- SSetiawan Beny, & Nurcahyanto Herbasuki. (2020). *Analisis Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*.
- Talib, D. (2021). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Destinasi Wisata. *Tulisan Ilmiah Pariwisata (Tulip)*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.31314/Tulip.3.1.12-18.2020>
- Yunita Nugroho, A., & Zarkasyi Rahman, A. (2022). *Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang*.
- Calvin Fredrico, F., & Abdullah, Z. (2020). *Pola Koordinasi Lembaga Adat Dan Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara)*. 2020(3), 915–929.

Cahyo Nugroho, H., & Zauhar, S. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Nganjuk. *J-Pal*, 5(1).

Arifiana Rahmandari, I., Ashabul Kahfi, R., Ahmad Rahmad, L., Made Putra Suryantara, I., & Hambali, M. (2024). *Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Guna Meningkatkan Penghasilan Asli Desa Di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021* (Vol. 2, Number 1). <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology>

Firdausijah, R. T., Alaslan, A., Mustanir, A., Sunariyanto, A., Fauzan, R., Sagena, U., Putra, A., & Amane, O. (2023). *Manajemen Sektor Publik Pt Global Eksekutif Teknologi*. www.globaleksekutifteknologi.co.id

Surat L. Theodorus. (2020). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud Theodorus L. Surat Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di. *Jurnal Administrasi Publik*.

TTololiu Rareney, Dengo Salmin, & Loday Very. (2022). Koordinasi Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, *Viii*, 48–55.